THE INDONESIAN Forum	**Seri 118** **Kamis, 20 Maret 2025** **Rangkuman DISKUSI**

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

TEMA	**:**	**Efisiensi Anggaran: Inovasi atau Pembatasan Bagi Daerah**
Pemateri	**:**	1. Felia Primaresti, Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute 2. Dr. Ninasapti Triaswati, Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 3. Ni Made Dwipanti Indrayanti, S.T., M.T.
Moderator	**:**	Putu Rusta Adijaya, Peneliti Bidang Ekonomi, The Indonesian Institute
Partisipan	**:**	Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Pada sesi pertama, Felia Primaresti, Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute. Felia menjabarkan bahwa efisiensi anggaran dilakukan untuk mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan anggara, meningkatkan efektivitas belanja negara, dan menciptakan stabilitas ekonomi. Dampak positif dari efisiensi ini adalah optimalisasi penggunaan anggaran, peningkatan efektivitas belanja daerah, insentif bagi daerah yang efisien dalam pengelolaan anggaran, dan alokasi ulang ke sektor prioritas. Berikutnya adalah dampak negatif yaitu pemangkasan program layanan publik, potensi penurunan kualitas pelayanan (pendidikan, kesehatan, dan sosial), dampak terhadap tenaga kerja di sektor pemerintahan dan proyek daerah, ketimpangan fiskal antara daerah kaya dan daerah miskin, dan risiko perlambatan pembangunan di daerah.

Kementerian dengan pagu anggaran tertinggi 2024 adalah Kementerian PUPR, sedangkan di 2025 adalah Kementerian Pertahanan. Ada pergeseran peringkat dalam kedua pagu ini walaupun presiden sekarang dan sebelumnya berada di kubu yang sama, namun preferensi pendanaannya berbeda. Perlu ditekankan bahwa efisiensi anggaran juga dibarengi dengan efisiensi sumber daya manusia. Kemudian perlunya komunikasi kebijakan yang baik untuk meningkatkan legitimasi.

Berikutnya, Nina menyampaikan bahwa makna efisiensi anggaran yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan tidak boleh ada PHK, harus mengurangi biaya operasional tanpa tidak mengurangi kualitas pelayanan publik, dan hanya investasi untuk tujuan strategis sebagai efek pengganda tinggi. Penurunan pelayanan publik terjadi jika jam kerja menurun. Hal ini terlihat dalam kebijakan WFA. Kemudian kualitas pelayanan menurun jika obat menurun kualitasnya atau kegiatan ekstra kurikuler menurun jumlahnya. Untuk pelaksanaan penegakan hukum, perlu dimonitor apakah kualitasnya menurun sejak anggaran bidang hukum yang turun di yudikatif. Ini harus dicek setelah 3 bulan.

Nina menjelaskan bahwa saat ini yang menjadi prioritas adalah investasi strategis untuk mendapatkan efek pengganda tinggi. Investasi kementerian dan lembaga (K/L) hanya untuk prioritas strategis saja. Dari sekitar Rp 750 triliun penghematan/efisiensi anggaran, program MBG memperoleh sekitar Rp450 triliun dan diharapkan mendorong pertumbuhan sektor lainnya (pertanian dan lapangan kerja). Kemudian untuk

Dnanantara yang memperoleh sekitar Rp300 triliun untuk hilirisasi industri. Diharapkan bisa mendorong pertumbuhan sektor lainnya.

Maka dari itu, Nina menyampaikan perlunya monitoring dan evaluasi secara berkala di K/L dan daerah khususnya dampak terhadap pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Untuk pertumbuhan ekonomi bisa dicek triwulanan dan penciptaan lapangan kerja bisa dicek per semester (Februari dan Agustus).

Diskusi diteruskan oleh Ni Made. Dari sudut pandang Pemerintah Daerah DI Yogyakarta. Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Pemda DIY melakukan konsolidasi internal yang ditindaklanjuti dengan SE Sekda atas nama Gubernur Nomor B/900.1.12/510/SET Tahun 2025 tentang Efisiensi Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025; melakukan identifikasi komponen beberapa belanja yang selaras dengan Inpres 1 Tahun 2025; dan penataan ulang belanja daerah dengan prioritas pada pelayanan publik, *mandatory spending*, serta permasalahan pembangunan di daerah.

Membengkaknya kelembagaan baru di pusat juga menjadi dampak di daerah. Apakah perlu juga membenahi lembaga di daerah untuk menyesuaikan pusat. Penyediaan lembaga-lembaga baru di daerah juga menjadi tantangan dan tambahan untuk anggaran karena harus ada infrastruktur baru untuk lembaganya. Inpres dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 membuat Pemda DIY mengurangi kurang lebih 295 miliar rupiah. Dalam sektor pariwisata dan umkm, dampak yang dirasakan adalah penurunan pendapatan hotel dan usaha karena pemerintah mengurangi acara di hotel. Permintaan produk UMKM dan jasa transportasi juga menurun. Dari sektor ketimpangan regional, kesenjangan semakin melebar. Kemudian dari sektor pelayanan publik dan transformasi digital, dampak yang dirasakan adalah resiko penurunan kualitas layanan dan peningkatan efisiensi melalui e-government. Made mengusulkan perlunya promosi hotel dan usaha lainnya ke sektor swasta dan insentif fiskal untuk hotel, juga bantu UMKM beralih ke pasar digital. PErlu dialokasikan dana khusus untuk daerah tertinggal. Serta memprioritaskan kualitas layanan dan tetap mengoptimalkan e-governance.

FORUM DISKUSI

1. Apa saja pengalaman atau upaya yang sudah dilakukan Pemda DIY, terutama dalam konteks kolaborasi pentahelix? Apakah kolaborasi ini dapat menjadi sumber dana alternatif untuk mendukung kerja pemerintah?
   Jawaban: Alternatif pembiayaan yang dilakukan DIY adalah dengan melakukan optimalisasi aset, menggandeng forum CSR untuk membantu proses pembiayaan program prioritas daerah, terkait kemiskinan, pelayanan publik, dan pembangunan berkelanjutan. Pemda DIY juga sudah menggandeng kampus untuk memanfaatkan program KKN tematik dalam mengumpulkan data kesejahteraan sosial di wilayah sasaran. Tantangan yang masih dialami adalah proses pengukuran dampak dari program yang dilakukan.
2. Apakah pasar membaca kebijakan efisiensi anggaran sebagai hal yang positif? Apakah efisiensi anggaran cenderung menjadi resep dalam mengeksekusi kebijakan atau malah jadi blunder terhadap mutu pelayanan publik, jika tidak diawasi dengan ketat?
   Jawaban: Agar MBG dan hilirisasi berhasil mencapai multiplier effect, pemerintah perlu melakukan transparansi dan pelibatan pemda. Selain itu, alur transfer dana MBG ke daerah perlu dimonitor secara berkala agar semua daerah mendapatkannya secara merata.

3. Apa saja kebijakan yang sudah diupayakan oleh DIY dalam memutus ketimpangan DIY yang masih tinggi?
   Jawaban: Terkait masalah ketimpangan, DIY melakukan intervensi dari tingkat kelurahan dengan reformasi birokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ini dilakukan agar program ketimpangan berbasis kebutuhan kelurahan dan berkontribusi dalam penurunan stunting. Akuntabilitas kebijakan diukur dengan penghitungan indikator kinerja layanan publik dan melihat tren pertumbuhan pendapatan masyarakat. Meski efisiensi, pemberdayaan masyarakat tetap diprioritaskan oleh DIY berbasis karakteristik wilayah. DIY melakukan pemberdayaan masyarakat desa sesuai potensinya, seperti membuat program Desa Maritim, Desapreneur, Desa Budaya.
4. Apakah efisiensi ini mungkin akan berlanjut tahun depan?
   Jawaban: Ya karena berdasarkan pernyataan pemerintah, efisiensi ini tahunan.
5. Apakah ada Bumbes dan Koperasi yang ada malah tumpang tindih dan menantang di tengah efisiensi anggaran?
   Jawaban: Transparansi anggaran ini menjadi pekerjaan tata kelola pemerintah, khususnya dalam realokasi dana desa menjadi koperasi merah putih yang digadang-gadang dapat meningkatkan produktivitas desa di September nanti.

Closing Statement

Ninasapti Triaswati

Evaluasi dampak efisiensi ke depannya harapannya bisa dilakukan secara mikro juga dengan menjamin transparansi capaian data indikator dan ketersediaan data secara komprehensif.

Felia Primaresti

Penting melihat transparansi transfer pusat ke daerah dan mengawal akuntabilitas pemerintahan dalam mempertahankan layanan publik yang masih berkualitas dan merata.

Ni Made Dwipanti Indrayanti

Efisiensi anggaran ini perlu diklarifikasi oleh pemerintah secara transparan disertai sosialisasi juklak dan juknis program andalan pemerintah, seperti MBG agar pemda tidak mengalami kebingungan dalam pengelolaannya.

Catatan :

1. ***Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum***
2. ***Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".***

TERIMA KASIH ~